

Ditolak Beberapa Warga Setempat, DLH Banjarmasin Ngotot Tetap Bangun TPS 3R



Sumber gambar:

<https://kalsel.prokal.co/read/news/50779-ditolak-beberapa-warga-setempat-dlh-banjarmasin-ngotot-tetap-bangun-tps-3r.html>

Warga Jalan Jahri Saleh, Kelurahan Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), menolak pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Reuse Reduce Recycle (3R).

Warga protes pada saat pembangunan TPS3R. Sedangkan di lokasi, pekerja dan material bangunan, galam, sudah ada.

Penuturan seorang warga, yakni Rifani, protes kepada pekerja lantaran pembangunan TPS3R tersebut tidak ada persetujuan dari warga di sebagian RT 10.

Aksi protes juga sempat dilontarkan kepada Lurah. Sayangnya, Lurah juga tidak dapat berbuat apa-apa lantaran proyek tersebut merupakan milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

Protes tersebut juga dituangkan dengan surat penolakan. Alasan yang dikemukakan, pemerintah tidak mengundang dan meminta persetujuan warga yang terdampak langsung atau berdekatan dengan lokasi pembangunan TPS3R.

Kemudian, dalam surat tersebut berdampak pada kondisi kesehatan, meningkatkan resiko terjadinya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas), diare dan penyakit lain.

TPS 3R di kawasan Jalan Jahri Saleh RT 10, Kecamatan Banjarmasin Utara akan tetap dibangun. Meskipun masih ada warga yang menolak.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin, Alive Yoesfah Love mengutarakan hal itu di ruang kerjanya (31/8) siang. Alive menilai bahwa penolakan yang dilayangkan segelintir warga itu tidak berdasar.

Pihaknya juga hanya “menggeser” TPS lama di sana yang bersisian dengan fasilitas pendidikan. Jaraknya hanya beberapa meter saja dari lokasi pembangunan TPS 3R. “TPS lama itu cukup kumuh. Sampahnya sering meluber hingga ke badan jalan. Bahkan, sampai membuat jalanan sulit dilintasi,” ucapnya.

Alive yakin berbeda halnya bila ada bangunan TPS 3R di situ. Menurutnya, pengguna jalan maupun warga tidak akan terganggu. TPS 3R bakal dibangun dengan sangat baik.

Bentuknya berupa bangunan. Bukan seperti TPS pada umumnya. Di dalamnya juga ada aktivitas pemilahan sampah yang dibuang. “Semua akan dikelola dengan baik. Bangunan pun tidak langsung menghadap ke jalanan atau rumah warga,” tekannya.

“TPS 3R itu rencananya melayani dua rukun tetangga atau RT. Yakni RT 10 dan RT 18. Jika dikelola dengan benar, maka akan jauh lebih baik dari TPS sebelumnya,” yakinnya.

Alive membeberkan pembangunan TPS 3R merupakan bantuan Kementerian PUPR. Dibiayai dengan APBN. Dana yang dikucurkan sekitar Rp500 juta. “Pembangunan harus segera dilakukan. Kalau tidak direalisasikan, maka anggaran akan dikembalikan,” katanya.

Aksi protes warga mengenai pembangunan TPS 3R ini mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kota Banjarmasin. Anggota Komisi III, Muhammad Isnaini menuturkan hal ini menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya, pengelolaan sampah agar lebih baik memang menjadi kebutuhan kita semua. Namun, bukan berarti mengindahkan berbagai aspek lainnya. “Kalau alasan mendasar lantaran berdekatan dengan rumah warga, saya pikir penolakan itu wajar,” kata politisi vokal ini.

Seharusnya pemko melakukan pendekatan dan meminta persetujuan seluruh warga terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan. Ia juga menyarankan jika ingin mencari lokasi TPS, sejatinya menghindari permukiman warga.

Selain dapat mengganggu lingkungan karena tumpukan sampah yang mungkin bisa sampai meluber ke jalan, juga dapat menimbulkan bau kurang sedap.

Isnaini ingin pengelolaan sampah harus betul-betul modern. Supaya tidak ada kesan sampah menjadi sumber ketidaknyamanan, penyakit, dan sebagainya.

Lantas bagaimana langkah Komisi III mengetahui hal ini? Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut akan segera mengomunikasikan dengan DLH Kota Banjarmasin untuk menindaklanjuti masalah tersebut. “Kami akan koordinasikan dengan kawan-kawan di Komisi III untuk turun ke lapangan,” cetus Isnaini.

Diwartakan sebelumnya, penolakan pembangunan TPS 3R datang dari warga yang rumahnya bersisian langsung dengan lahan pembangunan. Berdasarkan surat penolakan yang diterima Radar Banjarmasin, setidaknya ada 21 warga tidak setuju dengan lokasi pembangunan itu. Bahkan warga yang memprotes juga sudah memasang spanduk penolakan di lahan tersebut.

Penolakan juga sudah dilayangkan dua kali ke kelurahan setempat. Pertama, pada Kamis (3/8). Kedua, pada Senin (28/8) tadi.

Salah seorang warga yang menolak pembangunan adalah Rifani. Selain bakal menimbulkan bau hingga mengundang sumber penyakit, ia yakin pembangunan TPS 3R di dekat permukimannya hanya akan membuat harga jual tanah turun.

Menurutnya, pembangunan TPS 3R juga pernah hendak digarap pada tahun 2018 lalu. Namun, gagal lantaran diprotes warga. Rifani menyebut yang setuju pembangunan, justru warga tinggal di kawasan belakang. Sedangkan mereka yang bersentuhan langsung dengan TPS 3R masih tidak setuju. Rifani juga menuding pada rapat rencana pembangunan, warga yang tidak setuju justru tidak diundang.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/50779-ditolak-beberapa-warga-setempat-dlh-banjarmasin-ngotot-tetap-bangun-tps-3r.html>, 1 September 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/29/warga-protes-pembangunan-tps3r-di-jahri-saleh-banjarmasin-nyaris-terjadi-perkelahian/>, 29 Agustus 2023.

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-

wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.

- Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Struktur APBD

